

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KELAS RANGKAP PADA JENJANG SEKOLAH DASAR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO

Silmi Savira Nursyamsiyah^{1*}, Indira Arundinasari²

^{1,2} Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Korespondensi: simisavira9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Pembelajaran Kelas Rangkap Pada Jenjang Sekolah Dasar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kecamatan Sukapura Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah purposive sampling dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo sebagai instansi pelaksana dan juga melibatkan Pengawas Sekolah Dasar serta Masyarakat selaku Wali Murid. Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dimana terdapat pokok masalah yaitu kondisi sebagian besar tidak seimbang jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah murid yang diajarnya begitu pula dengan kondisi jumlah murid yang tidak memenuhi standar pagu satu kelas pada beberapa sekolah lainnya, maka dari itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo mencari solusi akan permasalahan tersebut dengan mengadopsi Program Kelas Rangkap (Multigrade Teaching) yang merupakan program kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan Australia di bidang pendidikan.

Kata kunci: Kelas Rangkap; Pembelajaran; Pendidikan; Sekolah Dasar.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of multigrade teaching at the elementary school level to improve the quality of education in Sukapura District, Probolinggo. The research method used was purposive sampling, with the Probolinggo Regency Education and Culture Office as the implementing agency, and also involved elementary school supervisors and the community as parents. In Probolinggo Regency, East Java Province, the main problem is the imbalance between the number of teachers and the number of students they teach, as well as the number of students who do not meet the standard for one class in several other schools. Therefore, the Probolinggo Regency Education and Culture Office sought a solution to this problem by adopting the Multigrade Teaching Program, a partnership program between the Indonesian and Australian governments in the field of education.

Keywords: *Multigrade; Learning; Education; Elementary School.*

A. PENDAHULUAN bagian terpenting dalam tonggak utama
Sektor pendidikan membentuk suatu menuju kemajuan generasi penerus bangsa

dalam menyikapi rintangan besar untuk beradaptasi seiring dengan perkembangan teknologi. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, masyarakat, bangsa dan negara.” Diantara bidang pendidikan yang perlu diperhatikan juga mencakup mengenai standar pengelolaan satuan pendidikan, tenaga kependidikan dan para peserta didiknya yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang “Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah” kemudian fokus utama pada penelitian ini berada pada jenjang pendidikan pendidikan dasar, dengan basis pemikiran yang menyesuaikan terhadap sistem pendidikan nasional didalam Undang-Undang Republik Indonesia maka pemerintah mewajibkan keberlangsungan terhadap penyusunan pendidikan untuk mempertahankan ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi. Mengamati dari hasil data yang diperoleh dari UNESCO dalam *Global Education Monitoring* (GEM) dalam laporannya yang dilakukan pada tahun 2016, kualitas pendidikan di Indonesia menduduki posisi pada tingkat 10 dari 14 negara berkembang di seluruh dunia. Menurut hasil data lainnya yang merujuk pada survey Programme For International Student Assessment (PISA) di tahun 2019 yang dikutip Alifah (2021),

adalah sebuah organisasi dimana fokus penelitiannya salah satunya tentang mutu atau kualitas pendidikan di dunia, memberikan keterangan tentang kualitas pendidikan di Indonesia masuk dalam kategori rendah pada tahun 2018, dimana menduduki pada peringkat 72 dari 78 negara, dan hasil data tersebut menunjukkan status yang stagnan didalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir.

Berbagai macam faktor yang kompleks melanda kemajuan sektor pendidikan untuk berkembang dan berkualitas, dengan garis besarnya mencakup faktor lembaga pendidikan, faktor jumlah tenaga pendidikan, faktor kualitas peranan tenaga pengajar, operasional satuan pendidikan yang kurang diperhatikan, rendahnya sarana dan prasarana yang kurang mencukupi. Hal tersebut terjadi pada setiap lembaga pendidikan yang merata hampir diseluruh negeri, salah satunya pada penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Probolinggo yang masih menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut salah satunya penulis ambil yaitu dapat ditinjau menurut data Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Tabel Permasalahan Pembangunan Pendidikan		
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimal Mutu Layanan Pendidikan	Rata-rata kompetensi pendidikan dan lembaga pendidikan masih rendah	Masih belum meratanya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

		Kompetensi tenaga pendidikan masih rendah
	Kurangnya pendidik dan tenaga pendidikan	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang tenaga guru PNS

Sumber : Renstra pendidikan Kabupaten Probolinggo tahun 2018 – 2023, 2025

Berfokus pada distribusi guru yang dinilai kurang merata diantara beberapa sekolah yang kelebihan tenaga pengajar dalam Kota lalu sementara beberapa sekolah yang kekurangan tenaga pengajar di dalam Kabupaten mengakibatkan kegiatan belajar dan mengajar tidak dapat dijangkau oleh beberapa siswa didik secara menyeluruh, kekurangan tenaga pengajar juga merupakan permasalahan yang berdampak besar pada perkembangan potensi murid karena beban guru untuk membagi waktu pada beberapa kelas dapat mempengaruhi dalam kinerja, adapun hal tersebut bersamaan dengan rendahnya jumlah murid disuatu daerah sebagaimana yang terjadi pada Kecamatan Sukapura yang menjadi bagian wilayah administrasi dari Kabupaten Probolinggo.

Dilansir berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo di tahun 2018, diketahui sejumlah 636 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 78.476 dan jumlah guru hanya sekitar 5.179, hal ini tersebar di masing-masing sekolah yang ada di Kabupaten Probolinggo. Tentunya sebagian dari beberapa sekolah mendapati pendistribusian guru tidak merata. Maka

dari itu berangkat dari hal tersebut inisiasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo ialah dengan menginisiasi program melalui adopsi model pembelajaran Kelas Rangkap (*Multigrade Teaching*).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari dan memahami tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dan terbentuk dalam susunan kata-kata serta bahasa didalam suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah.

Peneliti menggunakan teori Implementasi Edward III dalam (Kadji 2015) yang memiliki empat variable yaitu : Komunikasi, Sumberdaya Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi dengan teknik Purposive Sampling Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013:104). Teknis analisis data menggunakan teknis analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana dalam (Sugiyono, 2023;143) yakni tahap pengumpulan data, tahap kondensasi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, Berupa observasi yang diadakan langsung bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dan data sekunder sekunder antara lain

kebijakan Peraturan Bupati, buku, jurnal, artikel yang memiliki kaitan dengan fokus dan topik penelitian mengenai implementasi program pembelajaran kelas rangkap pada Sekolah Dasar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi pembelajaran ini peneliti mengacu pada fokus penelitian dengan menggunakan teori implementasi dari Edward III yang dikutip dalam (Kadji, 2015) dimana dengan mencakup empat variabel yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi atau sikap pelaksana, dan Struktur birokrasi penjelasan tersebut sebagai berikut :

1. Komunikasi

Dalam unsur komunikasi Edwards III dalam Kadji (2015:8) menegaskan bahwasannya suatu kebijakan akan tercapai secara efektif jika organisasi penanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui tindakan yang akan dilakukan. karena jika pesan yang hendak disampaikan tidak ditangkap dengan sangat jelas dan tidak terspesifikasikan akan ada kemungkinan besar timbul kesalahpahaman yang terjadi. Komunikasi dalam program yang dijalankan dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan diawali melalui nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah daerah dengan tim INOVASI sebagai Non Governmental Organization (NGO) atau organisasi non pemerintahan sebagai bentuk komitmen sekaligus jalur komunikasi institusional pemerintah daerah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Probolinggo hingga nantinya tersampaikan kepada setiap tenaga pendidikan yakni Kepala Sekolah, Guru pada masing masing satuan pendidikan, dan Pengawas Sekolah Dasar di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Proboinggo pada bagian ini Kccamatan Sukapura menjadi pilot project atau proyek pencontohan dengan artian Kecamatan Sukapura menjadi lokasi uji coba pertama dalam pelaksanaan program pembelajaran kelas rangkap. Komunikasi selanjutnya yaitu memberlangsungkan struktur kerja bersama antara Dinas Peniddikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dengan INOVASI kemudian diikuti dengan pengembangan perangkat bersama dan pembentukan Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk kelas rangkap. Pendampingan kepada kepala satuan pendidikan dan guru, dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat gugus melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendampingan di tingkat satuan pendidikan dilakukan kepada kepala satuan pendidikan dan guru Pendampingan kepada kepala satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan kegiatan kelas rangkap Sedangkan pendampingan kepada guru meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan pembelajaran, dan diskusi pasca pendampingan untuk tindak lanjut (refleksi) yang dilakukan oleh pengawas dan kepala satuan pendidikan.

Kemudian komunikasi dilanjutkan kepada perangkat desa dan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus sebagai wali murid, dalam sosialisasi tentang program kelas rangkap terhadap masyarakat tidak mendapat persetujuan secara tidak langsung hal tersebut dikarenakan akibat kesalahpahaman tentang konsep kelas

rangkap namun hal tersebut telah dapat teratasi dengan pengadaan sosialisasi berulang.

2. Sumberdaya

Dalam unsur sumberdaya Edwards III menjelaskan bahwa kepentingan dari sumberdaya tersebut meliputi staf yang tepat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, yang mengetahui informasi tentang cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan memiliki kewenangan untuk menyakinkan kebijakan yang telah diputuskan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Dalam hal ini implementasi program kelas rangkap terhadap sumberdaya antara lain berada pada pemerintah daerah dan satuan pendidikan selaku penyelenggara kelas rangkap dengan penjelasan :

- 1) Peran pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kelas rangkap terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantuan serta evaluasi yang meliputi beberapa unsur diantaranya :
 - a. Rujukan regulasi, regulasi dalam penyelenggaraan ini tertuang pada Peraturan Bupati Probolinggo Nomor
 - b. 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pembelajaran Kelas Rangkap (MULTIGRADE TEACHING) Jenjang Sekolah Dasar.
 - c. Pelaksanaan dijalankan dengan melakukan pemetaan awal terhadap kondisi satuan pendidikan yang berpotensi menjadi penyelenggara kelas rangkap hal ini dengan mengumpulkan laporan kondisi sumber daya satuan pendidikan yang memenuhi kriteria penyelenggaraan kelas rangkap, termasuk

mengidentifikasi jumlah peserta didik, ketersediaan guru, kondisi sarana dan prasarana, serta aksesibilitas satuan pendidikan.

- d. Menetapkan satuan pendidikan sesuai dengan kriteria sebagai penyelenggara kelas rangkap melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Dinas Pendidikan setempat

- 2) Peran Satuan Pendidikan terhadap penyelenggaraan kelas rangkap terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantuan serta evaluasi yang meliputi beberapa unsur diantaranya

- a. Satuan pendidikan atau sekolah melakukan identifikasi jumlah peserta didik, jumlah guru, dan ketersediaan sarana prasarana.
- b. Dalam pelaksanaannya membuat alur penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap meliputi : 1). Pemetaan kurikulum dan penentuan materi pembelajaran, 2). Penyusunan dan pelaksanaan asesmen formatif dan 3). Pengembangan rencana kegiatan pembelajaran.

3. Disposisi

Pada unsur disposisi atau sikap pelaksana Edwards II menjelaskan faktor penting dalam proses implementasi suatu kebijakan akan berlangsung efektif dengan cara mengetahui dan memiliki kapabilitas serta keinginan untuk melaksanakannya. Implementasi yang optimal tidak hanya bergantung pada aspek dan administratif melainkan juga dipengaruhi oleh kecenderungan sikap positif dari para pelaksana.

Hal ini terlihat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo yang hadir dengan melakukan pemetaan awal pada satuan pendidikan dan dimana sekiranya satuan pendidikan tersebut memenuhi kriteria yang akan berpotensi menjadi penyelenggara kelas rangkap. Kemudian melakukan pendekatan dengan wali murid yang berperan sebagai masyarakat dengan memberikan sosialisasi awal tentang penyelenggaraan kelas rangkap pada satu an pendidikan yang memiliki potensi dapat menyelenggarakan kelas rangkap dilanjutkan dengan menyusun surat pernyataan kesanggupan calon satuan pendidikan terpilih untuk menyelenggarakan kelas rangkap.

Salah satunya kepada wali murid yang berada pada Kecamatan Sukapura dimana wali murid pada awal mendapati informasi empat memberikan penolakan lisan secara tidak langsung, maka Dinas Pendidikan melakukan kegiatan sosialisasi berulang sehingga wali murid dapat memahami konsep dari kelas rangkap tersebut hingga sekarang.

4. Struktur Birokrasi

Pada unsur Struktur Birokrasi Edwards III menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang baik diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan dapat mencakup koordinasi antar satuan organisasi yang solid untuk menghindari kesalahpahaman terhadap kewenangan dan mempercepat pengambilan keputusan.

Dalam hal ini Implementasi Program Kelas Rangkap di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo telah menerapkan struktur yang terkoordinasi melalui SOP yang diatur dalam Peraturan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pembelajaran Kelas Rangkap (MULTIGRADE TEACHING)

Jenjang Sekolah Dasar SOP ini mengatur ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip, kurikulum, rencana pembelajaran, tugas guru, pelatihan, pengawasan, hingga ketentuan penutup, dan wajib diikuti oleh para guru untuk memastikan pembelajaran kelas rangkap berjalan efektif.

Penelitian serupa hasil dari penelitian terdahulu yang berjudul “ Efektifitas Pembelajaran Kelas Rangkap Dalam Meningkatkan Keterlibatan Aktif Siswa di Pendidikan Sekolah Dasar” oleh Ahmad Zamhari, Raniah Salsabila, Wahyu Munita Sari, Dewi Bunga Anggraini, Lenita Sari, Nazwa Cindi Irma Viola (2025). Dimana penelitian ini berfokus pada metode pelaksanaan melalui interaksi yang mendorong siswa agar lebih aktif dalam kegiatan berdiskusi, kerja sama, dan eksplorasi terhadap materi pembelajaran. Dengan mengidentifikasi proses pembelajaran kelas rangkap serta mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap dan manfaatnya. Perbedaan dari segi fokus penelitian menggambarkan bagaimana kondisi sebelum dan sesudah model pembelajaran diterapkan melalui indikator mutu yang sesuai dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), penelitian ini juga membahas pokok-pokok tujuan baik yang tercantum dalam regulasi pelaksanaan model pembelajaran kelas rangkap. teori yang dipakai ialah teori implementasi oleh David C.Korten dimana jika dilihat dari teori penelitian terdahulu menggunakan teori Efektivitas Dan dari segi lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di daerah Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dengan lembaga penggerak utama ialah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo,

dimana perbedaan dari penelitian terdahulu tidak disebutkan secara spesifik lokasi penelitian namun hanya menyebutkan SD Negeri gari II, Yogyakarta sebagai bentuk perbandingan penelitian terdahulu oleh peneliti yang bersangkutan.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan implementasi kelas rangkap di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh empat variabel menurut teori Edward III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif terjalin melalui nota kesepahaman antara pemerintah daerah dengan NGO INOVASI, dilanjutkan dengan pembentukan kelompok kerja guru, pendampingan bagi kepala sekolah dan guru, serta sosialisasi kepada masyarakat. Meski sempat muncul kesalahpahaman di kalangan orang tua terkait konsep kelas rangkap, hal ini dapat diatasi melalui sosialisasi berulang yang akhirnya membangun pemahaman dan dukungan.

Selain itu, sumber daya yang mendukung implementasi program berasal dari pemerintah daerah dan satuan pendidikan, baik melalui regulasi, pemetaan awal, penguatan kompetensi guru, maupun pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Sikap pelaksana juga menjadi faktor penting, terlihat dari komitmen Dinas Pendidikan yang melakukan pendataan sekolah dengan keterbatasan guru dan murid, serta mendorong penerapan kelas rangkap di delapan sekolah dasar. Program ini diperkuat dengan struktur birokrasi yang jelas melalui SOP dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2019.

Dengan demikian, kelas rangkap tidak hanya menjadi solusi bagi keterbatasan guru dan murid, tetapi juga strategi peningkatan mutu pendidikan dasar di wilayah Sukapura secara terukur dan terarah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adam, A. (2022). Pembelajaran Kelas Rangkap (Multigrade Teaching) Di Sekolah Dasar. CV.AA.RIZKY.
- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi revisi). CV.ALFABETA.
- Alifah, S. (2021). Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Mengejar Keteringgalan Dari Negara Lain Education In Indonesia And Abroad: Advantages And Lacks. *Cermin : Jurnal Penelitian*.
- Dendi Herdianysah, P. S. (2020). Pembangunan Sektor Pendidikan Sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*.
- Fenny Afifatul Awwaliyah, I. M. (2021). Pembentukan Indeks Mutu Pendidikan (Imp) Di Indonesia Tahun 2018 Dan Faktor Yang Memengaruhinya. *Seminar Nasional Official Statistics*.
- Hamalik, O. (2007). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta*

- Realitas* . Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo (UNG Press).
- Khaidir Fadil, N. I. (2023). Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Mewujudkan Sustainable Developments Goal's. *Attadib:Journal of Elementary Education*.
- Kurniawati, F. N. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi. *AoEJ: Academy of Education Journal*.
- Lilian G Katz, D. E. (1990). *The Case For Mixed-Age Grouping In Early Education*. National Association for the Education of Young Children.
- Marsini Astuti. (2021). MULTIGRADE DIMASA PANDEMI. *Pedagogy : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Nila Fitri Mawaddah, S. A. (2024). Analisis Model Pembelajaran Kelas Rangkap dalam Penerapan Pembelajaran Untuk Sekolah Dasar. *JURNAL JENDELA PENDIDIKAN*, 390-397.
- Nugroho, R. D. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo.
- Pranata, A. (2024). Evaluasi Instrumen Tes Non Kognitif pada Pembelajaran Kelas Rangkap di Pendidikan Dasar. *Jurnal Pendidikan : Riset dan Konseptual*.
- Suryana, S. (2020). PERMASALAHAN MUTU PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PENDIDIKAN. *Jurnal Edukasi*.
- Syamsul Bahri, B. S. (2020). *MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM*
- LEMBAGA PENJAMINAN MUTU* . Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG .
- Takdir, L. (2021). STUDI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KELAS RANGKAP DI DAERAH TERPENCIL. *Diadik: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*.
- Utami, R. D. (2023). Pemberdayaan Guru dan Fasilitator dalam Pembelajaran Kelas Rangkap pada Sanggar Belajar Malaysia Berpendekatan Profil Pelajar Pancasila. *Buletin KKN Pendidikan*, 96-105.